

BAB IV

Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1 Implementasi Kebijakan Percepatan Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

Implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas memiliki dasar peraturan yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penanganan *Stunting* di Kota Semarang maka pada penelitian ini hasil dan temuan akan disinkronkan dengan peraturan tersebut beserta teori implementasi kebijakan yang digunakan pada penelitian ini.

A. Tepat Kebijakan

Kelurahan Tanjung Mas memiliki dasar kebijakan resmi yang jelas dan terukur yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi data sekunder sebelum ada Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 Kota Semarang memiliki kasus *Stunting* yang tinggi dan tidak

ada upaya secara masif dari Pemerintah Kota Semarang untuk mengupayakan penurunan *Stunting*. Sebagai kelurahan yang memiliki kasus *Stunting* terbanyak diantara semua kelurahan di Kota Semarang adanya kebijakan ini membantu Kelurahan Tanjung Mas untuk melakukan Implementasi Kebijakan yang mengupayakan penurunan *Stunting*.

Disisi lain, berdasarkan data yang ada kasus prevalensi *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas tidak turun bahkan mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya dalam penurunan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, kebijakan tersebut dinilai tidak tepat dalam implementasi kebijakan di Kelurahan Tanjung Mas

B. Tepat Pelaksana

Pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 tertulis bahwa setiap lingkungan pemerintahan Kota Semarang harus menjalin sebuah komitmen dalam menurunkan angka *Stunting*. Pada penelitian ini bahasan akan menjadikan Kelurahan Tanjung Mas sebagai lokus pada analisa tepat pelaksana. Dalam hal ini maka sebuah ketepatan pelaksana hanya akan dibahas pada implementasi kebijakan percepatan penurunan *Stunting* yang ada di Kelurahan Tanjung Mas.

Berdasarkan paparan dan penjelasan implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas tidak lepas dari pengaruh dari pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat, dan institusi pendidikan.

Dalam upaya tersebut terbentuklah berbagai kegiatan aksi daerah yang sinkron dalam menurunkan *Stunting* dan penanggulangan kasus *Stunting* baru.

Pihak swasta yang terlibat dalam upaya penanganan *Stunting* adalah PT PLN Indonesia Power, PT Pelindo, PT Pertamina, dan Baznas. Adanya pihak swasta ini bisa diidentifikasi sebagai akselerator pada penelitian ini. Pihak swasta terkait beberapa kali membantu menggelar program pelayanan masyarakat untuk Posyandu dan Balita di Balai Kelurahan Tanjung Mas, memberikan penambahan makan tambahan (PMT) pada balita, dan pendampingan budidaya ikan lele sebagai bentuk upaya pemenuhan gizi guna menambah probabilitas penambahan kasus *Stunting* yang baru dan menekan kasus *Stunting* yang ada.

Pihak LSM yang berkaitan dengan Kelurahan Tanjung Mas ialah Tanoto Foundation. Kelurahan Tanjung Mas termasuk sebagai salah satu sasaran dari program Tanoto Foundation dikarenakan merupakan Kelurahan yang tingkat ekonomi terendah dan kasus *Stunting* yang tinggi di Kota Semarang. Program dari Tanoto Foundation ialah kampanye peningkatan pemahaman tentang *Stunting*, Mengusahakan komunikasi strategi perubahan perilaku, pelatihan tim pendamping keluarga (TPK), dan menyediakan rumah atau sentra dimana pendampingan bisa dilakukan kepada orang tua anak yang mengalami *Stunting*.

Pihak masyarakat berperan sebagai pengingat dan membangun perhatian kepada permasalahan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas. Pada konteks ini forum

masyarakat ditugaskan oleh Pemerintah Kelurahan Tanjung Mas sebagai tim percepatan penanganan *Stunting* di Tanjung Mas. Disisi lain, institusi pendidikan melakukan pelatihan kader, validasi data, pendampingan pemberdayaan, dan kajian ilmiah di Kelurahan Tanjung Mas. Sebagaimana semboyan Tri Dharma Perguruan Tinggi, institusi pendidikan harus ikut andil terkait permasalahan kesehatan *Stunting* yang sudah menjadi fokus pembangunan sumber daya manusia di Indonesia.

Berdasarkan konteks tepat pelaksana pada penelitian ini terdapat penemuan yang terjadi dalam implementasi kebijakan. Sebagaimana terjadi dua intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik. Temuan tersebut menghadirkan beberapa pelaksana dalam implementasi kebijakan yang ada di Kelurahan Tanjung Mas. Dalam intervensi gizi spesifik terdapat OPD yang bersektor di bagian kesehatan seperti UPTD Puskesmas Bandarharjo yang menaungi Kelurahan Tanjung Mas sebagai lingkup wilayah kerjanya, sedangkan bagian intervensi gizi sensitif dilaksanakan oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, swasta, institusi pendidikan, dan OPD diluar sektor kesehatan seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, DP3A Kota Semarang, Dinas Ketahanan Pangan, dan KUA setempat.

Berdasarkan temuan tersebut maka dapat dianalisa bahwa implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas memiliki kontrol implementasi yang baik dikarenakan menggambarkan sebuah keharmonisan

dari beberapa pihak sesuai pada Teori Kontrol Implementasi Tepat Pelaksana Riant Nugroho yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta.

C. Tepat Target

Berdasarkan hasil dan temuan terdapat kontrol implementasi yang baik pada Ketepatan Target. Hal ini dapat terbilang karena berdasarkan hasil dan temuan program kerja yang ada dalam instruksi Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 tersampaikan kepada target yang tepat

Maka dari itu ketetapan target implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas memenuhi kriteria baik, karena terdapat beberapa identifikasi yang tepat dengan kontrol implementasi tepat target.

D. Tepat Lingkungan

Berdasarkan hasil dan temuan implementasi kebijakan yang ada di Kelurahan Tanjung Mas teridentifikasi bahwa kontrol implementasi kebijakan tepat lingkungan tidak berjalan dengan baik dikarenakan permasalahan yang ada pada kondisi sosial dan kondisi kultural masyarakat Kelurahan Tanjung Mas.

Pada bahasan poin pertama tepat lingkungan yaitu kondisi sosial, masyarakat Kelurahan Tanjung Mas terhambat mengenai kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu. Berdasarkan temuan tersebut menghadirkan sebuah analisa terkait stigma yang dimiliki masyarakat yang tidak mampu terhadap permasalahan *Stunting*

sebagaimana perbaikan gizi untuk tumbuh kembang anak memerlukan biaya yang tinggi. Hal ini menjadikan masyarakat tidak memperhatikan gizi yang diberikan terhadap anak. Dilain hal, kader PKK dan Posyandu kesulitan membangun kepercayaan kepada masyarakat terkait pemberian gizi baik supaya anak menjadi pribadi yang berkualitas dan tidak rentan terhadap penyakit.

Pada poin kedua tepat lingkungan yaitu kondisi kultural. Berdasarkan hasil dan temuan masyarakat kelurahan tanjung mas memiliki kualitas pendidikan yang tidak tinggi. Hal ini merujuk kepada pola asuh yang buruk dan tidak memperhatikan gizi yang diberikan kepada anak. Temuan pada kondisi kultural masyarakat Kelurahan Tanjung Mas dijadikan alasan utama terkait masyarakat target sasaran kebijakan tidak mengikuti berbagai kegiatan aksi daerah yang berkaitan dengan *Stunting* secara penuh dan maksimal.

Bedasarkan paparan tersebut dapat dianalisis bahwa kontrol implementasi tepat lingkungan pada implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas dapat dianalisa bahwa kontrol implementasi tidak berjalan dengan baik.

4.1.2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas Kota Semarang

Pada penelitian ini analisis faktor pendukung dan penghambat akan dibagi menjadi tiga identifikasi yaitu faktor politik, faktor strategik, dan faktor teknis. Dalam hal ini faktor pendorong dan penghambat akan dianalisa dengan identifikasi dari ketiga faktor tersebut. Apabila ada temuan dari identifikasi faktor tersebut maka dapat dinilai sebagai faktor pendukung, namun apabila tidak ada temuan dari faktor yang diidentifikasi maka dapat dinilai sebagai faktor penghambat.

A. Faktor Politik

Berdasarkan hasil dan temuan yang ada dapat diidentifikasi bahwa Pemerintah Kota Semarang memberi perhatian terkait permasalahan *Stunting* secara khusus. Hal ini dapat dilihat dari adanya inovasi Rumah Pelita dan Rumah Sigap Anak yang didirikan khusus Masyarakat Kecamatan Semarang Utara sebagai sebuah dukungan inovasi dalam menghadapi *Stunting*, alokasi dana yang memadai, dan konsistensi membangun komunikasi terkait perencanaan, koordinasi, pelaporan, dan evaluasi terkait implementasi kebijakan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas. Adanya poin poin tersebut menghadirkan sebuah analisa bahwa Implementasi Kebijakan Percepatan Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas memiliki sebuah dukungan politik.

Jadi dapat dianalisa faktor politik pada penelitian ini menghadirkan sebuah kesimpulan bahwa Kelurahan Tanjung Mas mendapatkan dukungan politik dalam mengupayakan penurunan *Stunting*. Hal ini dapat terbilang karena terdapat poin-poin yang masuk ke bagian dukungan politik untuk Kelurahan Tanjung Mas dalam implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.

B. Faktor Strategik

Pada penelitian ini faktor strategik berupa dasar kebijakan implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas yaitu Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penanganan *Stunting* di Kota Semarang. Pada dasarnya implementasi kebijakan Kelurahan Tanjung Mas memiliki dasar peraturan yang jelas dan terukur meskipun wali anak yang terkena dampak *Stunting* enggan untuk mengikuti instruksi dan produk kebijakan secara utuh. Dalam poin ini dapat dinilai bahwa implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas memiliki dua identifikasi yaitu dukungan berupa adanya dasar kebijakan yang jelas dan terukur, dan hambatan berupa wali anak yang terdampak *Stunting* enggan mengikuti instruksi dan produk kebijakan secara utuh.

C. Faktor Teknis

Faktor teknis pada implementasi kebijakan percepatan penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas terdapat temuan kendala berupa masyarakat yang dinilai tidak sadar akan pentingnya masalah kesehatan bagi tumbuh kembang anak. Hal ini kemudian menghadirkan sebuah dugaan bahwa implementasi kebijakan faktor teknis sebagai bagian faktor penghambat. Hal ini dapat disimpulkan karena beberapa hambatan yang dijumpai Pihak Kelurahan Tanjung Mas, dan UPTD Puskesmas Bandarharjo sebagai implementor di lingkup Kelurahan Tanjung Mas. Dalam permasalahan sanitasi. Kompleksnya permasalahan *Stunting* dinilai peneliti membuat pihak implementor berupaya ekstra untuk mengimplementasikan kebijakannya.

Hal yang mendasari faktor teknis masuk sebagai faktor penghambat ialah permasalahan sikap dan karakter masyarakat yang tidak memberi perhatian terkait permasalahan kesehatan *Stunting*. Pada dasarnya mengubah perilaku susah di masyarakat. Adanya sosialisasi bisa merubah pengetahuan dan sikap tetapi tidak dalam prakteknya. Hasil dan temuan pada faktor teknis menghadirkan evaluasi terkait masyarakat penerima manfaat yang belum berubah perilakunya terkait mengupayakan penurunan *Stunting* meskipun masyarakat penerima manfaat sudah mengetahui tetapi prakteknya belum dilaksanakan dengan baik.

4.2 Saran

Dari penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa hambatan dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas. Berikut adalah saran yang bisa diberikan oleh peneliti.

1. Sebagai fasilitator Instansi Kelurahan Tanjung Mas harus memberikan sebuah pendekatan melalui strategi komunikasi yang dapat menarik perhatian masyarakat rentan *Stunting* untuk menjadi bagian dari kebijakan. Pada dasarnya strategi komunikasi sudah dipaparkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penanganan *Stunting* di Kota Semarang pada bagian pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) namun belum dilaksanakan oleh Kelurahan Tanjung Mas secara maksimal.
2. Terkait pembangunan fasilitas yang berhubungan dengan permasalahan kasus *Stunting*, kekurangan biaya menjadi hambatan di Kelurahan Tanjung Mas. Dalam hal ini Kelurahan Tanjung Mas dapat melaksanakan Musrenbang secara rutin terkait dengan skala prioritas pembangunan. Sebagai kelurahan dengan permasalahan *Stunting* tertinggi di Kota Semarang, pembangunan fasilitas yang berhubungan dengan permasalahan *Stunting* dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan.

3. Sebagai Tim Percepatan Penanganan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas, Kader Posyandu dan PKK harus diberi arahan khusus dalam penggunaan pengembangan materi komunikasi supaya dapat menarik masyarakat rentan *Stunting*.
4. Dalam intervensi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPPS), informasi yang akan disampaikan perlu dikemas menjadi pesan, yang dibagi menjadi pesan kunci dan pesan pendukung dikaitkan dengan perilaku kunci yang telah ditetapkan. Masing-masing pesan kunci akan didukung oleh pesan pendukung. Pesan kunci memuat perilaku atau praktik yang disarankan (*call to action*) dengan kalimat pesan yang spesifik, jelas, dan mudah diingat. Sedangkan pesan pendukung memuat informasi tambahan yang menjelaskan manfaat (aspek “Mengapa”) dari perilaku yang disarankan dan merinci praktik yang direkomendasikan serta solusi untuk mengatasi hambatan (aspek “Bagaimana”).
5. Sebagai instansi kesehatan yang mencakup Kelurahan Tanjung Mas sebagai lingkup wilayah kerjanya, UPTD Puskesmas Bandarharjo dapat mengevaluasi terkait lokasi beberapa kegiatan yang dilaksanakan tentang permasalahan *Stunting*. Hal ini terbilang dikarenakan lokasi kegiatan yang dilakukan oleh UPTD Puskesmas Bandarharjo menghadirkan hambatan oleh masyarakat rentan *Stunting* di Kelurahan Tanjung Mas.